

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika, 2009)
2. Kuswahyono, Imam, Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman, (Malang: Bayumedia, 2004)
3. Murhaini, S, Hukum Apartemen (Rumah Susun), (Yogyakarta: Togamas, 2023)
4. Widina, Hak dan Kepemilikan Rumah Susun: Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. (Jakarta: Widina, 2023)
5. Adh, R, Membangun Indonesia Melalui Industri Properti, (Jakarta: Pustaka KSP Kreatif, 2023)

B. Jurnal dan Artikel

1. Adriarga, N. A. B., Sudiro, A. A., & Safik, A. (2025). Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 190/Pdt. G/2021/PN. Jkt. Utr. *Binamulia Hukum*, 14(1), 19-31.
2. Alvita, A. (2021). Kepastian Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun. *Indonesian Notary*, 3(1), 9.
3. Askar, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 3(1), 16-32.

4. Hanifah, A. (2025). Peran Notaris terhadap Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 56-67.
5. Marbun, L. D., Ginting, B., & Sukarja, D. (2023). Tanggung Jawab Hukum Pengembang Rumah Susun Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanpa Sertifikat Laik Fungsi Kepada Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 63-80.
6. Pragusnaedi, M. (2023). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAFIA TANAH DI KABUPATEN WAJO (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
7. Prayoga, T. (2023). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dan Pembeli Rumah Susun Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Susun Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
8. Putra, S. A., Nasser, J., & Ismed, M. (2024). Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Pembangunan (Developer) dalam Penguasaan Satuan Rumah Susun Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 13-21.
9. Rizqi, M. D. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN YANG DI KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus Rumah Susun Di Pasar Kliwon) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

10. Sitepu, R. D., Kaban, M., & Leviza, J. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik rumah hunian yang dibangun di atas gedung dengan fungsi usaha. *Jurnal Normatif*, 4(1), 378-390.
11. SUBEKTI, S. (2015). Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen. Konsep Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Konsumen, 1(1), 39-67.
12. Wafi, M. S., & Suharto, R. (2016). Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi Di Star Apartemen). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.
13. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Properti", 2022.
14. Zachman, N. (2020). Rumah Susun Komersial yang Komprehensif dengan Prinsip Pengelolaan yang Ideal yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 137-157.
15. Zerlina, Z. (2020, November). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN TANPA SERTIFIKAT (STUDI KASUS APARTEMEN CASA GRANDE RESIDENCE). *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 509-538).

16. Zerlina, Z., & Taupiqurrahman. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertifikat (Studi Kasus Apartemen Casa Grande Residence). *Yuridis: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 123-135

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – Buku III tentang Perikatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320, 1238, dan 1365 tentang Perikatan dan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 dan 378 tentang Penggelapan dan Penipuan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Bangunan Gedung.
8. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Satuan Rumah Susun.